Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

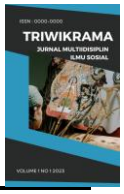

PANGGUNG KOMUNITAS DAN POLITIK KEBERSAMAAN: REFLEKSI KOHESI SOSIAL DI DESA KARANGWUNGULOR

Ahmad Noval Romadhoni[1], Abdul Halim[2]

[1,2]Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

ah.novalrohmadon2003@gmail.com[1], halim@uinsasby.ac.id[2]

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami panggung komunitas di Desa Karangwungulor yang berfungsi sebagai arena politik kebersamaan sekaligus penguat kohesi sosial. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dimaksudkan untuk mengeksplorasi praktik budaya dan politik warga, yang dimanifestasikan melalui serangkaian aktivitas kolektif warga sebagai fondasi kohesi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik kebersamaan di Karangwungulor lahir dari partisipasi aktif masyarakat, bukan semata dari struktur formal pemerintahan desa, namun diperoleh dari terbukanya ruang publik lokal yang mempertemukan berbagai ide dari ragam elemen masyarakat untuk berdialog dan berbagi peran dalam memperkuat kohesi sosial. Aktivitas tasyakuran HUT Kemerdekan RI, perlombaan, serta karnaval bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga media memperkuat solidaritas, kepercayaan, dan identitas kolektif warga. Fenomena politik kebersamaan tampak pula dalam ruang-ruang informal, seperti diskusi di pertemuan keagmaan, warung kopi dan forum karang taruna. Ruang publik lokal ini berfungsi sebagai arena negosiasi dalam membangun konsensus sosial. Dinamika "panggung depan" dan "panggung belakang" dalam komunikasi warga menunjukkan bahwa politik kebersamaan bersifat cair dan fleksibel, memadukan formalitas dengan keakraban sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa politik kebersamaan berbasis komunitas mampu memperkuat kohesi sosial, meningkatkan kesadaran politik warga, dan menghadirkan alternatif praktik demokrasi lokal yang partisipatif serta inklusif. Meski demikian, tantangan seperti fragmentasi kepentingan, dominasi kelompok, dan modernisasi perlu diantisipasi agar panggung komunitas tetap menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan kohesi sosial desa.

Kata kunci: panggung komunitas, politik kebersamaan, kohesi sosial, demokrasi lokal, *etnografi*.

Abstract

This study aims to understand the community stage in Karangwungulor Village, which functions both as an arena of collective politics and as a means of strengthening social cohesion. Adopting a qualitative approach with an ethnographic method, the study explores cultural and political practices of the villagers, manifested through a series of collective activities that serve as the foundation of social cohesion. The findings reveal that collective politics in Karangwungulor arises from active community participation, not merely from formal village governance structures, but through the opening of local public spaces where diverse social elements come together to engage in dialogue and share roles in reinforcing social cohesion. Activities such as independence thanksgiving rituals, competitions, and carnivals are not only forms of entertainment but also media for fostering solidarity, trust, and collective identity. The phenomenon of collective politics is also evident in informal spaces, such as religious gatherings, coffee stalls, and youth forums. These local public spaces serve as arenas of

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

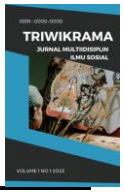

negotiation in building social consensus. The dynamics of "front stage" and "back stage" communication among villagers illustrate that collective politics is fluid and flexible, blending formality with everyday familiarity. This study affirms that community-based collective politics can strengthen social cohesion, enhance citizens' political awareness, and present an alternative model of local democracy that is participatory and inclusive. Nevertheless, challenges such as interest fragmentation, group dominance, and modernization need to be anticipated so that the community stage remains a solid foundation for sustaining the village's social cohesion.
***Keywords**: community stage, collective politics, social cohesion, local democracy, ethnography.*

1. PENDAHULUAN

Komunitas desa merupakan ruang sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat desa, berbagai aktivitas kolektif menjadi sarana memperkuat ikatan sosial serta menjaga keberlanjutkan nilai kebersamaan. Menurut (Etzioni 1996), komunitas adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh ketertarikan suatu emosional, jaringan interaksi sosial, serta nilai-nilai bersama yang menjadi dasar kohesi sosial. Dalam konteks desa, keterikatan itu sering dimanifestasikan melalui kegiatan gotong royong, ritual budaya, maupun dalam forum musyawarah yang meneguhkan kebersamaan warga.

Habermas (1991) menekankan pentingnya ruang publik (public sphere) sebagai arena diskusi warga untuk membangun konsensus. Dalam kerangka ini, panggung komunitas desa dapat dipahami sebagai ruang publik lokal, tempat warga mengartikulasikan kepentingan, menyuarakan aspirasi, sekaligus merumuskan keputusan bersama. Politik kebersamaan pada hakikatnya mengacu pada suatu proses kolektif di mana masyarakat membangun relasi sosial, memelihara solidaritas, serta menciptakan ruang yang inklusif bagi musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Konsep ini tidak semata-mata dimaknai sebagai politik formal, tetapi juga tercermin dalam aktivitas keseharian yang menjaga keteraturan sosial, memperkuat kepercayaan antarwarga, serta mengelola perbedaan kepentingan (Habermas, 1991; Putnam, 2000).

Dalam konteks lokal, politik kebersamaan diwujudkan melalui gotong royong, kerja bakti, maupun festival desa yang berfungsi sebagai media negosiasi sosial dan pemeliharaan kohesi. Penelitian (Hidayat 2020) menunjukkan bahwa ruang publik desa menjadi arena penting bagi praktik politik kebersamaan, meskipun di dalamnya tetap terdapat dinamika konsensus dan konflik. (Yuliani 2023) menemukan bahwa festival desa dapat menjadi ruang politik yang inklusif, sedangkan (Rosyid 2021) menegaskan bahwa praktik gotong royong dalam perayaan 17 Agustus bukan hanya memperkuat solidaritas sosial, melainkan juga membangun pengalaman politik kebersamaan yang berbasis komunitas.

Kohesi sosial merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial yang menjelaskan keterhubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. (Chan, To, and Chan 2006)mendefinisikan kohesi sosial sebagai kondisi masyarakat yang ditandai oleh tingkat kepercayaan (trust), rasa memiliki (sense of belonging), dan keterlibatan aktif warga dalam kehidupan sosial. Teori ini menekankan bahwa kohesi sosial bukan hanya soal ikatan emosional, tetapi juga keteraturan sosial yang menopang keberlangsungan masyarakat. Dalam kerangka sosiologis klasik, (Durkheim 1997) menegaskan bahwa kohesi sosial Lahir melalui pembagian kerja sosial yang Menumbuhkan solidaritas mekanik maupun organik. Solidaritas mekanik muncul dalam masyarakat tradisional yang homogen, Sementara solidaritas organik tumbuh

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

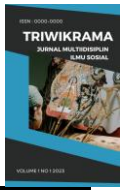

dalam masyarakat modern yang lebih kompleks. Hal ini relevan untuk konteks pedesaan Indonesia, Di mana tradisi dan budaya lokal masih menjadi Basis pengikat antarwarga.

Secara empiris, kajian di Indonesia menunjukkan bagaimana tradisi lokal menjadi ruang penting bagi terwujudnya kohesi sosial. Penelitian (Indrawadi et al. 2022) di Seberang Palinggam, Sumatera Barat menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam tradisi multietnis memperkuat rasa persatuan melalui praktik budaya bersama. Tradisi Kai Wait di Kabupaten Buru (Hamiru dkk., 2023) berfungsi sebagai sarana jaringan sosial yang menjaga solidaritas dalam komunitas pertanian. Di Lombok, tradisi Merangkat terbukti meningkatkan social trust antarwarga desa melalui gotong royong (Jurnal UMMAT, 2023). Sementara itu, studi tentang inklusivitas masyarakat Desa Pekuncen terhadap komunitas adat Bonokeling (Bonokeling and Banyumas 2024) memperlihatkan bahwa penerimaan lintas kelompok dapat memperkuat harmonisasi sosial.

Meski demikian, modernisasi, perubahan nilai serta dinamika politik lokal kerap menghadirkan tantangan bagi kohesi sosial. Politik kebersamaan yang idealnya menjadi ruang konsensus kadang terfragmentasi oleh kepentingan kelompok. Dalam konteks inilah, panggung komunitas desa seperti perayaan 17 Agustus, kegiatan seni, lomba, maupun kerja bakti menjadi arena penting untuk merefleksikan sejauh mana politik kebersamaan mampu memperkuat kohesi sosial.

Namun, kajian tentang perayaan hari kemerdekaan sebagai bentuk panggung komunitas yang merefleksikan politik kebersamaan masih terbatas. (Rosyid 2021) lebih menekankan pada dimensi gotong royong, sementara (Yuliani 2023) fokus pada festival desa sebagai arena politik kebersamaan. Belum banyak penelitian yang secara spesifik menyoroti praktik politik kebersamaan melalui panggung komunitas di desa Karangwunggulor. Padahal, ruang komunitas semacam ini berpotensi memperlihatkan bagaimana modal sosial (Putnam 2000) terbangun melalui interaksi warga dalam kegiatan kolektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berkontribusi dengan menghadirkan pemahaman mendalam tentang bagaimana panggung komunitas dalam perayaan hari kemerdekaan di Desa Karangwunggulor berfungsi sebagai arena politik kebersamaan dan refleksi kohesi sosial. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang kohesi sosial di tingkat desa, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang politik kebersamaan sebagai alternatif praktik politik yang berbasis partisipasi, solidaritas, dan inklusivitas warga. Dalam konteks Desa Karangwunggulor, panggung komunitas yang muncul melalui perayaan hari kemerdekaan menjadi arena sosial yang merefleksikan kebersamaan politik. Politik kebersamaan di sini dipahami bukan dalam arti politik formal, melainkan sebagai proses membangun konteks, solidaritas, serta hubungan harmonis antarwarga melalui praktik budaya dan kegiatan kolektif. Hal ini sejalan dengan gagasan (Putnam 2000) tentang modal sosial, bahwa interaksi dalam kegiatan komunitas mampu memperkuat kepercayaan, kerjasama, serta jaringan sosial.

Apabila panggung komunitas terus dipertahankan dan berfungsi baik, ia dapat memperkuat kohesi sosial dan memberikan ruang politik bagi warga untuk berpartisipasi secara aktif. Namun demikian, ada tantangan tersendiri seperti konflik antar-kelompok, dominasi kekuasan lokal, ketidaksetaraan akses dalam forum publik desa, atau terkikisnya budaya lokal yang mendasari kebersamaan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana panggung komunitas di desa karangwungulor berfungsi sebagai arena politik kebersamaan. Panggung komunitas dipandang bukan sekedar ruang pertemuan warga, melainkan wadah yang mempresentasikan praktik sosial, budaya, dan politik lokal yang menecerminkan kohesi sosial masyarat desa karangwungulor.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

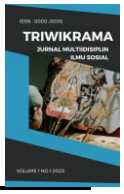

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui eksplorasi makna, nilai, dan pengalaman subjektif masyarakat dalam praktik kebersamaan. Menurut (Creswell and Poth 2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif tentang suatu fenomena dalam konteks alamiah, dengan fokus pada perspektif partisipan. Dalam konteks ini, etnografi digunakan sebagai strategi penelitian untuk menggali secara intensif praktik sosial dan budaya yang membentuk politik kebersamaan di Desa Karangwungulor.

Etnografi, sebagaimana dijelaskan (Spradley 1980), merupakan upaya untuk memahami sistem budaya dari sudut pandang anggota komunitas yang diteliti. Berbeda dengan studi sosial yang berfokus pada analisis struktural dari luar, etnografi menekankan pada perspektif emik atau cara pandang orang dalam (Geertz 1973). Peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sosial masyarakat untuk mendeskripsikan sekaligus menafsirkan pola interaksi, nilai, dan praktik budaya yang membentuk solidaritas. Dengan demikian, etnografi memungkinkan peneliti menangkap dinamika politik kebersamaan yang tidak hanya muncul dalam forum formal, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari seperti gotong royong, musyawarah desa, maupun perayaan kolektif.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Desa ini dipilih karena memiliki panggung komunitas yang khas, terutama melalui perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, yang berfungsi sebagai arena politik kebersamaan sekaligus medium penguatan kohesi sosial. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, meliputi aktor-aktor kunci yang berperan dalam praktik kebersamaan, yaitu kepala desa, tokoh agama, tokoh partai politik lokal, pemimpin organisasi pemuda, serta warga yang aktif dalam kegiatan sosial. Pemilihan subjek ini dimaksudkan agar peneliti dapat menangkap beragam perspektif tentang bagaimana politik kebersamaan dijalankan dan dimaknai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti hadir langsung dalam kegiatan masyarakat dan turut terlibat untuk memahami proses interaksi secara alami (Spradley 1980). Kedua, wawancara mendalam, yang digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang dikonstruksi warga terkait politik kebersamaan (Kvale 1996). Ketiga, dokumentasi, berupa catatan peristiwa, arsip desa, serta foto kegiatan, yang berfungsi memperkuat dan melengkapi data lapangan.

Analisis data mengikuti model analisis etnografi Spradley, yang terdiri dari beberapa tahap sistematis: (1) analisis domain, untuk mengidentifikasi kategori makna yang luas dalam praktik sosial; (2) analisis taksonomi, yang menyusun struktur hierarki hubungan antar kategori; (3) analisis komponen, untuk melihat perbedaan dan kesamaan antar elemen budaya; serta (4) analisis tema budaya, guna menemukan pola umum yang menjelaskan makna politik kebersamaan di desa (Spradley, 1980).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan; triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi; sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data di berbagai momen kegiatan desa. Hal ini sesuai dengan anjuran (Lincoln and Guba 1985) serta (Sugiyono 2022) bahwa keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus dijaga dengan strategi validasi yang ketat.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana panggung komunitas berfungsi sebagai arena politik kebersamaan, sekaligus menjadi instrumen penguat kohesi sosial di Desa Karangwungulor. Lebih jauh, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis tentang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

hubungan antara modal sosial, ruang publik, dan kohesi sosial di tingkat lokal (Putnam 2000); (Habermas 1991); (Etzioni 1996).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Komunitas sebagai proses kebersamaan

Hasil wawancara dengan (Ahmad Hilmi Fathudin,S.Pd. 2025) ketua Karang Taruna priode 2018- 2025, Desa Karangwungulor menunjukkan bahwa politik komunitas dipahami sebagai suatu proses dalam menentukan keputusan dan membentuk kebijakan yang berfokus pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dalam konteks Desa Karangwungulor, politik komunitas lahir bukan semata-mata dari struktur pemerintahan desa yang formal, tetapi justru dari partisipasi aktif masyarakat dalam merespons momentum-momentum tertentu. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Etzioni 1996) tentang komunitarianisme, bahwa masyarakat bergerak berdasarkan nilai dan kebutuhan kolektif yang diikat oleh moralitas kebersamaan.

Politik komunitas di Desa Karangwungulor berlangsung melalui sebuah proses kebersamaan yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses ini dimulai ketika warga menghadapi suatu kebutuhan atau permasalahan bersama, misalnya pembangunan fasilitas umum, pelaksanaan perayaan hari besar, atau penyelesaian persoalan sosial di tingkat desa. Dalam situasi tersebut, masyarakat menginisiasi musyawarah secara terbuka untuk menampung berbagai pendapat, gagasan, dan aspirasi.

Gambar 1. Musyawarah semua Warga Di Desa Karangwungulor

Di Desa Karangwungulor, aspirasi masyarakat menjadi motor penggerak yang menuntun akan arah keputusan bersama. Misalnya, ketika masyarakat menghadapi kebutuhan bersama dalam penyelenggaraan kegiatan sosial, pembangunan sarana desa, maupun perayaan hari besar, warga berinisiatif untuk bermusyawarah, menyampaikan gagasan, dan mengambil keputusan secara kolektif. Dengan demikian, politik komunitas di desa ini lebih dekat dengan budaya musyawarah dan gotong royong yang sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa (Geertz 1973); Rosyid, 2021).

Politik kebersamaan yang dijalankan warga Karangwungulor terlihat nyata dalam upaya memfasilitasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, forum informal, hingga partisipasi langsung dalam kegiatan publik. Menurut Hilmi, momen seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT RI) menjadi ruang kolektif yang memicu kreativitas, solidaritas, dan ekspresi kebangsaan. Pada momen tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor aktif yang berpartisipasi dalam lomba, karnaval, maupun kegiatan tasyakuran.

Fenomena ini selaras dengan pandangan (Habermas 1991) tentang public sphere, di mana ruang publik memungkinkan warga mengekspresikan pendapat dan membangun konsensus. Panggung komunitas di Karangwungulor berfungsi sebagai ruang publik lokal, tempat masyarakat terlibat aktif dalam praktik demokrasi sehari-hari, baik dalam bentuk perayaan, dialog, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

3.2. Momentum Perayan Sebagi Panggung Komunitas

Data lapangan memperlihatkan bahwa momentum perayaan, khususnya HUT RI, menjadi panggung penting dalam membangun politik kebersamaan. Menurut penuturan (Pak Rokhim Kepala Desa Karangwungulor, 2025), kegiatan tasyakuran kemerdekaan bukan hanya ritual simbolik, melainkan ruang kebersamaan yang mempertemukan seluruh lapisan masyarakat. Melalui tasyakuran, masyarakat hadir bukan sekadar untuk makan bersama atau mengikuti acara seremonial, tetapi juga untuk meneguhkan identitas kolektif dan semangat nasionalisme.

Gambar 2. Tasyakuran malam 17 agustus

Dalam konteks ini, panggung komunitas hadir secara nyata: lapangan desa, balai desa, maupun halaman masjid menjadi arena di mana warga berkumpul, berkomunikasi, dan mengekspresikan solidaritas. (Koentjaraningrat 2004) menyebut praktik seperti ini sebagai perwujudan nilai gotong royong yang mengakar dalam budaya desa di Indonesia. Tasyakuran kemerdekaan di Karangwungulor tidak hanya mempererat hubungan antarwarga, tetapi juga menjadi sarana simbolik untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya persatuan(Halim 2020).

Gambar 3. Perayan 17 agustusan di desa karangwungulor

Hal tersebut juga didukung oleh pengamatan lapangan bahwa warga dari berbagai kelompok umur terlibat aktif dalam kegiatan: pemuda mempersiapkan perlombaan, ibu-ibu mengatur konsumsi, sementara para tokoh desa memimpin doa dan prosesi tasyakuran. Aktivitas ini menunjukkan adanya pembagian peran sosial yang harmonis, sebagaimana dijelaskan oleh (Durkheim 1997) dalam konsep solidaritas organik—di mana setiap individu memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi demi keberlangsungan komunitas.

3.3. Partisipasi dalam Politik Lokal

Politik lokal pada dasarnya merujuk pada dinamika politik yang berlangsung di tingkat desa atau komunitas, di mana warga berinteraksi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut (Manor 1999), politik lokal merupakan arena penting bagi demokrasi karena menjadi titik terdekat antara negara dan warga, sekaligus ruang di mana kepentingan masyarakat dapat diartikulasikan secara langsung. Dalam konteks ini, politik lokal tidak hanya dipahami sebagai proses elektoral seperti pemilihan kepala desa,

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tetapi juga mencakup praktik sehari-hari warga dalam mengelola kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, serta membangun konsensus

Politik tidak harus selalu berlangsung dalam ruang formal pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Cornwall 2004), ruang partisipasi warga dapat berbentuk ruang yang diundang invited spaces seperti musyawarah desa, maupun ruang yang muncul dari inisiatif warga claimed spaces, misalnya diskusi di warung kopi, perbincangan di pos ronda, atau interaksi di tempat umum(Halim 2018). Dalam ruang-ruang informal tersebut, warga membicarakan isu-isu lokal, mengartikulasikan kepentingan, bahkan membangun kesepahaman politik secara egaliter tanpa prosedur resmi.

Gambar 4. Ruang politik non formal

Selain momentum perayaan, partisipasi masyarakat Karangwungulor juga tampak dalam konteks politik elektoral, seperti pemilihan kepala desa maupun pemilu nasional. Menurut Hilmi, masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan untuk memastikan transparansi dan integritas proses politik. Kehadiran masyarakat dalam pengawasan ini menunjukkan bahwa politik kebersamaan tidak hanya sebatas aktivitas kultural, tetapi juga menjangkau ranah formal demokrasi.

Di Desa Karangwungulor, fenomena ini terlihat ketika masyarakat mendiskusikan persoalan pembangunan, perayaan desa, hingga isu pemilihan kepala desa di ruang-ruang sehari-hari. Perbincangan di warung, jalanan, dan forum sosial lain sering kali menjadi ruang politik alternatif yang lebih cair, terbuka, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Habermas 1991) tentang ruang publik, bahwa komunikasi yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari dapat membentuk opini bersama dan memengaruhi pengambilan keputusan kolektif. Dengan demikian, politik lokal dapat dipahami tidak sebatas pada ranah institusional atau formal, melainkan juga hadir dalam keseharian masyarakat. Politik kebersamaan di Karangwungulor bukan hanya tercermin dalam partisipasi elektoral, tetapi juga dalam praktik informal yang menjadi dasar penting bagi penguatan kohesi sosial dan demokrasi lokal.

Partisipasi warga dalam mengawasi pemilihan memperlihatkan adanya kesadaran politik yang tumbuh dari bawah bottom-up. Hal ini selaras dengan penelitian (Agustina, Izomiddin, and Apriani 2023) yang menekankan pentingnya partisipasi organisasi lokal seperti Karang Taruna dalam mendorong pembangunan desa yang lebih demokratis. Di Karangwungulor, partisipasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi desa sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses politik.

4.4. Panggung Komunikasi: Depan dan Belakang Layar

Sebelum masuk pada perspektif pemuda Karangwungulor, penting untuk dipahami bahwa praktik politik kebersamaan dalam komunitas desa tidak hanya berlangsung pada ruang-ruang formal, tetapi juga hadir dalam interaksi sosial sehari-hari. Politik komunitas dalam hal ini bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, melainkan proses membangun makna, konsensus, dan rasa kebersamaan melalui komunikasi yang terjalin di antara warga (Habermas, 1991; Putnam, 2000). Ruang komunikasi menjadi arena penting di mana warga desa mengekspresikan aspirasi, bernegosiasi, serta menegosiasikan identitas dan kepentingannya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dalam tradisi masyarakat pedesaan seperti di Karangwungulor, ruang-ruang komunikasi ini muncul dalam berbagai bentuk: mulai dari forum musyawarah desa, kegiatan perayaan kemerdekaan, hingga obrolan santai di warung kopi. Semua ruang tersebut menjadi panggung sosial yang memungkinkan masyarakat menampilkan ekspresi, ide, dan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, memahami politik kebersamaan di desa tidak cukup hanya melihat struktur formal pemerintahan desa, melainkan juga bagaimana komunikasi sosial berlangsung di antara warga.

Hasil Wawancara dengan (Fathullah Khan Arifin 2025) Pemuda Karangwungulor menambahkan perspektif tentang panggung komunitas sebagai panggung komunikasi. Ia menjelaskan bahwa komunikasi masyarakat dapat dibedakan antara "depan panggung" dan "belakang panggung". Seorang tokoh publik, misalnya politikus desa, ketika tampil di depan umum cenderung menjaga citra profesional, meyakinkan, dan persuasif. Namun, di balik panggung, interaksi berlangsung lebih cair, santai, dan personal.

Gambar 5. Panggung didepan layar dan dibelakang layar

Konsep ini sesuai dengan teori dramaturgi Erving (Goffman 1959), yang menyatakan bahwa kehidupan sosial ibarat sebuah panggung teater, di mana individu memainkan peran sesuai dengan situasi dan audiens. Dalam konteks Karangwungulor, panggung depan dapat dilihat pada momen peringatan HUT RI atau musyawarah desa, di mana tokoh masyarakat berperan formal dan menjaga wibawa. Sementara panggung belakang terlihat dalam interaksi sehari-hari, seperti perbincangan informal setelah acara tasyakuran atau diskusi santai di warung kopi.

Pembedaaan panggung ini menegaskan bahwa politik kebersamaan di desa bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan dinamis dan fleksibel sesuai konteks. Justru dari interaksi depan dan belakang panggung inilah lahir konsensus sosial yang menjadi dasar kohesi masyarakat.

5.5. Politik Kebersamaan sebagai Kohesi Sosial

Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa politik kebersamaan di Desa Karangwungulor berakar pada tradisi budaya sekaligus kesadaran politik warga. Praktik tasyakuran kemerdekaan yang rutin diadakan setiap 17 Agustus memperlihatkan bagaimana budaya lokal mampu mempererat solidaritas. Dalam acara ini, warga dari berbagai latar belakang berkumpul, membawa makanan, menghias panggung, dan mengikuti lomba bersama. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan simbolis, tetapi juga media untuk memperkuat rasa kebersamaan dan menghidupkan kembali nilai gotong royong yang telah lama melekat dalam tradisi Jawa (Koentjaraningrat, 2004).

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan kepala desa mencerminkan kesadaran politik warga akan pentingnya demokrasi. Warga tidak hanya hadir

untuk memberikan suara, tetapi juga aktif dalam proses pengawasan dan memastikan transparansi jalannya pemilu. Fenomena ini menjadi bukti bahwa politik kebersamaan tidak hanya lahir dalam ruang budaya, tetapi juga diartikulasikan dalam ruang politik formal.

Konsep panggung komunitas semakin terlihat dalam dinamika komunikasi warga. Pada saat musyawarah desa atau rapat karang taruna, para tokoh masyarakat tampil di "depan panggung" dengan menjaga citra, wibawa, dan formalitas. Namun, di balik panggung, seperti pada obrolan santai di warung kopi atau setelah acara tasyakuran, komunikasi berlangsung lebih cair, egaliter, dan personal. Interaksi semacam ini memperkuat kepercayaan antarwarga sekaligus menjadi ruang lahirnya konsensus sosial (Goffman, 1959).

Fenomena ini menguatkan pandangan Etzioni (1996) bahwa komunitas yang sehat adalah komunitas yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Desa Karangwungulor menunjukkan bahwa nilai kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi dapat menjadi modal sosial penting untuk menghadapi tantangan modernisasi sekaligus menjaga integritas demokrasi lokal.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa panggung komunitas di Desa Karangwungulor, khususnya dalam perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, berfungsi sebagai arena penting bagi terwujudnya politik kebersamaan dalam memperkuat kohesi sosial. Politik kebersamaan tidak hanya lahir dari struktur formal pemerintahan desa, melainkan tumbuh dari partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah, gotong royong, serta perayaan kolektif yang meneguhkan solidaritas dan identitas bersama.

Panggung komunitas hadir sebagai ruang publik lokal yang memungkinkan warga berinteraksi, menegosiasikan kepentingan, dan membangun konsensus melalui praktik budaya maupun politik sehari-hari. Fenomena ini tampak dalam kegiatan tasyakuran kemerdekaan, partisipasi pemilu, hingga diskusi informal di warung kopi, yang semuanya memperlihatkan keterhubungan antara aspek budaya, sosial, dan politik.

Dinamika "panggung depan" selaras dengan "panggung belakang" kaerna cakupan wilayah yang terbatas,disamping itu para aktor saling mengenal dan memahami satu sama lain bahkan beberapa terikat dalam hubungan kekerabatan. Dengan demikian proses komunikasi dan dialog antar toko bersifat fleksibel dan cenderung non formal. Pola komunikasi dan interaksi yang demikian ini meneumbuhkan kepercayaan antar sesama sekaligus berfungsi untuk meminimalisir potensi konflik yang dapat menggangu kohesi soisal. Jalur politik formal melalui struktuk pemerintahan dapat beriringan dengan jalur politik non formal melalui panggung komunitas. Hal ini membuktikan bahwa politik tidak selalu terbatas pada ruang formal, melainkan juga hadir dalam keseharian masyarakat desa.

Penelitian ini menegaskan bahwa politik kebersamaan berbasis komunitas di Karangwungulor mampu memperkuat kohesi sosial, menumbuhkan kesadaran politik warga, serta menghadirkan alternatif praktik demokrasi lokal yang partisipatif, inklusif, dan berakar pada nilai budaya. Namun demikian, tantangan seperti fragmentasi kepentingan, dominasi kelompok tertentu, dan modernisasi tetap perlu diantisipasi agar politik kebersamaan dapat terus menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan kohesi sosial desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang maha Esa, yang telah memberikan segaja kelancaran untuk melakukan penelitian ini. Serta Dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, serta arahan metodologis maupun teoritis dalam penyusunan penelitian ini. Terimakasih untuk penulis atas kesunguhanya dan keikhlasan untuk

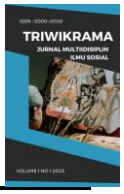

melakukan penelitian ini, tidak lupa dari motto hidup "nduweni ati ojo dadekno wani nduweni roso ojo agawe angkoro nuruti ati bakale mati nuruti roso bakale ciloko luwih becik manunggal agawe sentoso".

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A, Izomiddin, and R Apriani. 2023. "Partisipasi Politik Organisasi Karang Taruna Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*.

Bonokeling, Komunitas, and Pekuncen Banyumas. 2024. "Titian : Jurnal Ilmu Humaniora Inklusivitas Masyarakat Desa Pekuncen Terhadap Titian : Jurnal Ilmu Humaniora" 08 (02).

Chan, Joseph, Ho-Pong To, and Elaine Chan. 2006. "Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research." *Social Indicators Research* 75 (2): 273–302. https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1.

Cornwall, Andrea. 2004. "Spaces for Transformation? Reflections on Issues of Power and Difference in Participation in Development." *IDS Bulletin: Participation and Development* 35 (2): 72–79.

Creswell, John W, and Cheryl N Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Durkheim, Émile. 1997. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.

Etzioni, Amitai. 1996. *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*. New York: Basic Books.

Geertz, C. 1973. *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor Books.

Habermas, Jürgen. 1991. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.

Halim, A. 2018. *Politik Lokal: Aktor, Problem, Dan Konflik Dalam Arus Demokratisasi*. Intrans Publishing.

———. 2020. *Islam Lokalitas Dan Kebhinekaan*. Malang: Intrans Publishing.

Hidayat, A. 2020. "Ruang Publik Desa: Dinamika Konsensus Dan Konflik Di Tingkat Lokal." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 24 (2): 200–214.

Indrawadi, Junaidi, Isnarmi Moeis, Maria Montessori, Wirdanengsih Wirdanengsih, Fatmariza Fatmariza, Arieska Dwi Asmil, and Hafsyari Hafsyari. 2022. "Penguatan Kohesi Sosial Melalui Peran Aktif Masyarakat Seberang Palinggam" 4: 333–39.

Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kvale, S. 1996. *Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks: Sage.

Lincoln, Y S, and E G Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

Manor, James. 1999. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington, DC: World Bank.

Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

Rosyid, R. 2021. "Gotong Royong Dalam Era Modernisasi: Studi Pada Perayaan 17 Agustus Di Desa Jawa Tengah." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 23 (2): 189–204.

Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yuliani, R. 2023. "Festival Desa Sebagai Arena Politik Kebersamaan." *Jurnal Politik Lokal Indonesia* 5 (1): 77–92.